

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini dapat disimpulkan Kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Anjayan Kabupaten Indramayu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Pemerintah daerah telah berupaya mensosialisasikan kebijakan ini melalui berbagai cara, namun tidak semua petani memahami informasi yang disampaikan.

5.1.2 Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi

1. Dimensi Komunikasi

Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menggunakan menyampaikan informasi tentang kebijakan pupuk bersubsidi, dengan ada petani yang kurang memahami mekanisme penebusan pupuk bersubsidi dan tingkat kehadiran dibawah 60%, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, sehingga sosialisasi dapat terserap seluruh petani. Kurangnya pemahaman petani dan kelompok berdampak pada pendataan RDKK yang tidak akurat, hal ini berdampak kepada kekurangan pupuk sehingga terpaksa membeli pupuk di wilayah lain dengan harga tinggi.

2. Dimensi Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Surat Keputusan Bupati, memiliki kepentingan untuk pengendalian, mengatur harga, ketersediaan dan juga pembagian yang adil di dasari dengan adanya kebijakan di atasnya. Pembatasan pupuk subsidi di Kabupaten Indramayu memberikan dampak perubahan yang cukup baik bagi petani meskipun masih belum optimal sepenuhnya akan tetapi hal ini sebaliknya kepada kios, hal ini dikarenakan kuota yang di berikan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan meningakinkan laba. Alokasi pupuk yang tidak sesuai kebutuhan yang hanya terealisasi sebanyak 37% menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk di kios, sementara di sisi lain, kios memiliki stok pupuk yang tidak terserap.

3. Dimensi Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Anjatan, menggunakan prinsip transparansi. Hal ini ditunjukkan melalui program "SEPEKAN PENDISTRIBUSIAN". Namun, transparansi ini belum sepenuhnya terwujud di tingkat bawah, khususnya pada kelompok tani. Kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis pengisian data di tingkat kelompok tani dan juga egosektoral pasca pemilihan kepala desa menyebabkan data yang tidak akurat. Hal ini berpotensi merugikan petani yang seharusnya berhak mendapatkan pupuk subsidi. Rendahnya realisasi pupuk subsidi sebesar 37% dan pendataan yang tidak sesuai menunjukkan adanya potensi praktik *rent seeking* dalam pelaksanaan program ini. Praktik *rent seeking* menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, sehingga tujuan program pupuk subsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani tidak tercapai secara optimal

4. Hasil Kebijakan (*Outcome*)

Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Anjatan, menunjukkan adanya dampak positif dan negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut memiliki efek nyata terhadap petani dan sektor pertanian. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif, seperti keterbatasan alokasi, distribusi tidak merata, dan penyelewengan. Petani mengharapkan adanya perubahan dan tindakan dimana pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap implementasi kebijakan ini.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung implementasi kebijakan pupuk subsidi melalui SK Bupati, korddinasi lintas sektor dalam Implementasi, dimana kordinasi tersebut dalam rangka memberikan sosialisasi melalui PPL. Dalam implementasi penggunaan teknologi digital menjadi terobosan yang mendukung dalam pendataan dan sosialisasi kebijakan. Selain itu juga adanya kelompok tani mendukung implemntasi kebijakan ini, keterlibatan

kelompok tani sebagai jembatan antara pemerintah dan petani. Implementasi kebijakan pupuk subsidi di Kecamatan Anjatan didukung oleh berbagai faktor, mulai dari komitmen pemerintah daerah, peran aktif kelompok tani, pemanfaatan teknologi digital, dan sinergi antar lembaga. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, sehingga kebijakan pupuk subsidi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani.

2. Faktor Penghambat

Dalam sosialisasi masih belum efektif hal ini dilihat dari Tingkat kehadiran yang masih rendah sekitar 50% dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu melalui DPP Kecamatan anjatan, hal ini berdampak kepada pemahaman petani yang masih belum memahami kebijakan tersebut, selain itu juga rendahnya SDM Kelompok Tani sehingga dalam pendataan dan juga verifikasi belum sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan dalam kebijakan tersebut, selain itu juga adanya ego sektoral dalam pendataan RDKK, Dimana penunjukan kelompok tani bukan berdasarkan kepada kemampuan melainkan berdasarkan afiliasi dari pasca pemilihan Kepala Desa sehingga berdampak kepada pengalokasian yang menguntungkan pendukung kepala desa dan hal ini berdampak kepada tidak mencukupi kebutuhan seluruh petani. Dengan pengalokasian pupuk mencukupi kebutuhan Masyarakat, realisasi dari pengajuan pupuk juga hanya 37% hal ini dapat dikatakan rendah karena masing-masing petani hanya mendapatkan 200Kg Urea dan 150Kg NPK Phoska hal ini menunjukan bahwa pupuk subsidi belum efektif dalam peningkatan produktivitas tanaman pangan di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi, menyederhanakan prosedur, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan partisipasi petani. Sosialisasi harus menjangkau seluruh

petani di Indramayu, terutama petani kecil dan petani di daerah terpencil. Gunakan berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan kelompok tani, media massa lokal, media sosial, dan platform digital lainnya

2. Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu melakukan perbaikan pada data RDKK, meningkatkan alokasi pupuk subsidi, mendorong diversifikasi usaha kios pupuk, penguatan sosialisasi, dan peningkatan transparansi
3. Lakukan kajian mendalam tentang kebutuhan pupuk riil petani di setiap kecamatan. Pertimbangkan faktor-faktor seperti jenis tanaman, luas lahan, dan musim tanam
4. Libatkan kelompok tani dalam pengawasan distribusi pupuk di tingkat desa. Berikan pelatihan kepada pengurus kelompok tani tentang mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.
5. Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani dalam bentuk pelatihan dan pendampingan yang intensif kepada kelompok tani dalam hal pendataan RDKK
6. Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu meningkatkan Transparansi di Semua Tingkatan, dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi atau platform digital, sehingga dapat memastikan bahwa informasi mengenai alokasi pupuk, data RDKK, dan proses penyaluran dapat diakses oleh petani dengan mudah, dan juga menghindari dari praktik *Rent Seeking*
7. Bentuk tim pengawas independen yang terdiri dari berbagai unsur, seperti pemerintah, kelompok tani, dan masyarakat sipil, untuk memantau pelaksanaan SK Bupati di lapangan.

5.3 Implikasi Teoritis

Implikasi konseptual adalah dampak dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah yang dilihat menggunakan teori kontruksi Implementasi George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle, dengan menggunakan Tiga Dimensi pada Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa:

1. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam implementasi kebijakan pupuk subsidi melalui SK bupati masih memiliki tantangan. Dimana dalam sosialisasi SK Bupati Indramayu belum optimal

dilakukan karena Masyarakat petani masih belum memahami secara menyeluruh tentang kebijakan tersebut. Komunikasi memiliki implikasi yang sangat penting dalam implementasi SK Bupati Indramayu tentang pupuk bersubsidi. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi petani, memastikan transparansi dan akuntabilitas, mencegah konflik, serta melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

2. Isi kebijakan (Content of policy), sosialisasi yang kurang efektif akan memberikan dampak yang mana Ketidak pahaman isi kebijakan berkaitan juga dengan ketidak pahaman tentang mekanisme penyaluran pupuk subsidi, sehingga pengawasan yang seharusnya dilakukan dari tingkat atas ke bawah. Tidak terjadi pengawasan di tingkat bawah menimbulkan potensi penyalahgunaan pupuk subsidi. Dimensi ini berfokus pada isi atau substansi dari kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan memiliki implikasi yang signifikan terhadap petani dan sektor pertanian di wilayah tersebut. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, namun juga memiliki potensi dampak negatif jika implementasinya tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu memerlukan strategi yang komprehensif dan terpadu untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program. Strategi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, petani, kelompok tani, dan distributor.
3. Konteks Implementasi (Context of Implementation), SK Bupati Indramayu tentang pupuk bersubsidi memiliki dampak positif yang signifikan bagi petani, terutama dalam hal keterjangkauan harga dan peningkatan produktivitas. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif yang perlu diatasi, seperti keterbatasan alokasi, distribusi tidak merata, dan penyelewengan. Selain itu Faktor-faktor seperti karakteristik sosial-ekonomi petani, kondisi geografis, struktur pemerintahan, peran kelompok tani, kepentingan politik, dan dinamika pasar pupuk dapat menjadi penghambat atau pendukung efektivitas kebijakan ini. Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap implementasi

kebijakan ini. Peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, perbaikan sistem distribusi, pengawasan yang lebih ketat, dan edukasi kepada petani tentang penggunaan pupuk yang tepat merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil

4. Hasil Kebijakan (Outcomes), SK Bupati Indramayu tentang pupuk bersubsidi memiliki dampak positif yang signifikan bagi petani, terutama dalam hal keterjangkauan harga dan peningkatan produktivitas. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif, seperti keterbatasan alokasi, distribusi tidak merata, dan penyelewengan. Perlu adanya evaluasi dan perubahan, dan peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, perbaikan sistem distribusi, pengawasan yang lebih ketat, dan edukasi kepada petani tentang penggunaan pupuk yang tepat sehingga kebijakan tersebut dapat menyesuaikan kebutuhan dan juga dapat selaras dengan kebijakan di atasnya.

